

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH DASAR: Aplikasi Teori Emile Durkheim tentang Moralitas dan Pendidikan Moral

=====
Oleh: Fitri Eriyanti

ABSTRACT

Durkheim had a great attention to morality and moral education. He viewed that, as an institution, a school had an important role in moral education. In his opinion, the best time to implant morality to children is when they are in their childhood, especially when they are in elementary school. In Indonesia, moral education is included into Civic Education curricula. In the case of elementary school, the goal of this subject is emphasized on the implementation of moral values in daily lives. This article will elaborate the difference between the concept of Durkheim's moral education and moral education implemented in Indonesia elementary schools.

Kata kunci: *Moralitas, Nilai Moral, Pendidikan Moral, Pendidikan Kewarganegaraan*

1. PENDAHULUAN

Emile Durkheim (1858-1917) hidup di suatu masyarakat yang terbongkar akarnya. Ia hidup dalam masyarakat yang telah kalah perang dan dihina, yang bersikap diskriminatif terhadap orang Yahudi, termasuk dia sendiri¹. Faktor inilah yang menyebabkan ia meninggalkan agama Yahudi lalu masuk agama Katolik. Tetapi, akhirnya ia meninggalkan Kato-
lisme dan menjadi orang yang tidak

mau tahu dengan agama (agnostic). Meskipun demikian, masalah-masalah dasar tentang moralitas dan usaha meningkatkan moralitas masyarakat merupakan perhatian pokok selama hidupnya².

Durkheim memandang pengajaran moral merupakan hal yang sangat penting untuk memperkuat

¹ Veeger, K. J. 1990. *Realitas Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hal: 155.

² Johnson, D.P. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I* (Diindonesiakan oleh Robert M. Z. Lawang). Jakarta : PT Gramedia. hal: 167.

dasar-dasar masyarakat dan meningkatkan integrasi serta solidaritas sosial. Dia bertekad untuk mendorong pendidikan yang akan menanamkan dalam jiwa warganya suatu perasaan kuat akan moralitas³.

Perhatiannya tentang moralitas dan pendidikan moral ini terpantul dalam berbagai tulisannya. Evolusi, bahkan revisi dari pemikiran Durkheim tentang hal ini tercermin, misalnya terlihat pada keinginannya menulis kata pengantar baru pada tulisannya yang dicetak ulang atau kadang-kadang pada *appendix* yang disertakan pada cetak ulang itu. Diantara tulisan-tulisan Durkheim yang membahas tentang moralitas dan pendidikan moral adalah: *L'Education Morale, De La Division Du Travail*, dan *Les Regles*⁴. Bahkan, Wilson telah menghasilkan sebuah studi yang teliti mengenai Durkheim yang berhubungan langsung dengan pendidikan moral. Wilson berpendapat bahwa Durkheim pertama-tama adalah seorang filosof moral dan sosiologinya berasal dari sikap moralnya⁵.

³ *Ibid*, hal:171

⁴ Abdulah, Taufik dan A.C. van Der Leeden (Penyunting). 1986. *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal: 11.

⁵ Wilson, E.K. 1990. Kata Pengantar dari Editor untuk Edisi Bahasa Inggris (Alih bahasa: Lukas Ginting) dalam *Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi*

II. TEORI EMILE DURKHEIM TENTANG MORALITAS DAN PENDIDIKAN MORAL

A. Hakikat Moralitas

Moralitas bagi Durkheim tidak hanya menyangkut suatu ajaran normatif tentang baik dan buruk, melainkan suatu 'sistem fakta' yang diwujudkan, (yang terkait dalam keseluruhan sistem dunia). Moralitas bukan saja menyangkut sistem perilaku yang 'sewajarnya' melainkan juga suatu sistem yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan, dan ketentuan-ketentuan ini adalah 'sesuatu yang berada di luar diri' si pelaku⁶.

Dalam berbagai tulisannya, Durkheim menjelaskan bahwa moralitas itu bertumpu pada tiga sikap dasar. Pertama, moralitas haruslah dilihat sebagai suatu 'fakta sosial' yang kehadirannya terlepas dari keinginan subyektif. Fakta sosial harus dianggap sebagai fenomena sosial, yang terdiri atas aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam bertindak yang bisa dikenal dari ciri khas tertentu. Karena itu, 'mestilah mungkin untuk melukiskannya, mengklasifikasikannya, dan untuk mencari hukum yang bisa menerangkannya'. Kedua, moralitas merupakan bagian yang fungsional

Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim. Jakarta: Erlangga. hal: xvi

⁶ Abdullah, *Op cit*, hal: 10.

dalam masyarakat. ‘Berbuat moralis-tis berarti berbuat menurut kepentingan kolektif’, katanya. Dengan demikian jelaslah bahwa dalil teoritis dari Durkheim adalah setiap masyarakat pada dasarnya mempunyai moralitas-nya sendiri. Ketiga, moralitas terlibat pula dalam proses historis yang bersifat evolusionistis, berubah sesuai struktur sosial⁷.

Menurut Durkheim, moralitas meliputi konsistensi dan keteraturan tingkah laku. Apa yang menjadi moral pada hari ini akan menjadi moral pada esok hari. Moralitas juga selalu meliputi pengertian wewenang. Kita dipaksa untuk bertindak dengan cara-cara tertentu. Kedua ciri moralitas ini – keteraturan tingkah laku dan wewenang – keduanya merupakan dua aspek dari satu hal : disiplin.

Moralitas berarti suatu orientasi aktivitas yang impersonal. Tindakan demi kepentingan diri sendiri tidak pernah dianggap bersifat moral. Tetapi, jika perilaku yang dianggap bersifat moral tidak diorientasikan kepada diri sendiri maka akan bersifat amoral. Dengan demikian, yang menjadi obyek perilaku moral adalah kelompok atau masyarakat. ‘Bertindak secara moral berarti bertindak demi kepentingan kolektif, bidang moral mulai dimana bidang sosial mulai’. Agar tidak

terjerumus pada amoral, dan dengan tetap berada di koridor komitmen kelompok atau masyarakat, maka diperlukan otonomi. Menurut Durkheim, otonomi menyangkut keputusan pribadi dengan mengetahui sepenuhnya konsekuensi-konsekuensi dari berbagai tindakan itu. Jadi, pengertian akan hukum moralitas akan meningkatkan otonomi⁸.

B. Sekolah sebagai Latar Pendidikan Moral

Durkheim membedakan dua tahap masa kanak-kanak. Tahap pertama hampir seluruhnya berlangsung dalam keluarga atau sekolah taman kanak-kanak. Tahap kedua berlangsung di sekolah dasar, yang disebutnya juga dengan ‘tahap kanak-kanak kedua’. Pada tahap ini anak mulai meninggalkan lingkungan keluarganya dan mulai memasuki lingkungan baru yang lebih luas.

Dalam membahas mengenai pendidikan moral, Durkheim memusatkan perhatiannya pada ‘tahap kanak-kanak kedua’. Menurutnya, tahap ini merupakan saat kritis dalam pembentukan sikap moral. Sebelum tahap tersebut, anak masih terlampau muda, perkembangan intelektualnya masih belum sempurna. Kehidupan

⁷ Abdullah, *Op cit*, hal: 12.

⁸Ginting, Lukas. (Alih bahasa). 1990. Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim. Jakarta: Erlangga. hal: xi-xii.

emosionalnya masih terlalu sederhana dan belum berkembang. Ia belum memiliki dasar intelektual yang diperlukan untuk dapat memahami gagasan-gagasan dan perasaan-perasaan yang cukup kompleks yang mendasari moralitas kita. Batas-batas yang mempersempit cakrawala intelektualnya sekaligus juga membatasi konsepsi-konsepsi moralnya. Di pihak lain, apabila sesudah 'tahap kanak-kanak kedua' itu berlalu, belum diletakkan dasar-dasar moralitas, maka dasar-dasar moralitas itu tidak akan pernah tertanam dalam diri si anak⁹.

Durkheim mengaplikasikan prinsip moralnya ke sekolah. Ia memandang sekolah (khususnya sekolah dasar) sebagai lembaga yang sangat penting bagi perkembangan moral anak. Menurutnya, hal ini disebabkan karena sekolah adalah suatu masyarakat atau kelompok ilmiah yang berkembang dari berbagai kelompok asal dan dari segala macam jenis. Jika peserta didik, pada tahap yang menentukan ini, dibawa pada jalan kehidupan sosial, kemungkinan besar ia akan tetap berorientasi dalam cara seperti itu sepanjang hidupnya. Jika ia mengembangkan kebiasaan untuk mengekspresikan minat dan aktivitasnya dalam berbagai kelompok, ia

akan tetap mempunyai kebiasaan ini dalam kehidupan selanjutnya setelah tamat sekolah¹⁰.

Bagi Durkheim, sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dan sangat khusus, yaitu menciptakan 'makhluk baru' yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau di sekolah anak dididik secara sistematis tentang warisan kebudayaan negerinya, maka ia dapat memiliki rasa identitas dan kepuasan pribadi. Apabila ia sadar akan keterlibatannya dalam suatu masyarakat terhadap mana ia diikat oleh kewajiban dan keinginan, maka ia dapat menjadi seorang makhluk yang bermoral.

Mengapa sekolah merupakan latar yang tepat untuk pendidikan moral? Durkheim menyisihkan gereja (agama), karena suatu moralitas yang logis harus dibentuk berdasarkan nalar, bukan dari wahyu (agama). Keluarga juga bukan merupakan tempat yang cocok karena keakraban dan kehangatan ikatan bertentangan dengan tuntutan moralitas yang keras. Keluarga yang kecil dan intim sebagaimana biasanya, memang dapat memberikan dukungan emosional dan pelepasan ketegangan, tetapi ia bukan latar yang tepat menanamkan gagasan abstrak tentang kewajiban. Di lain

⁹ Abdullah, *Op cit*, hal: 152.

¹⁰ Ginting, Lukas. 1990. *Op cit*, hal: 173.

pihak, pendidikan moral tidak dapat ditunda hingga umur dewasa, juga tidak dapat dapat dipercayakan kepada orang atau anggota keluarga yang sudah dewasa karena tuntutan mereka terlalu berlebihan bagi seorang anak kecil. Oleh karena itu tugas pendidikan moral berpindah kepada sekolah¹¹.

Menurut Durkheim, cara pendidikan moral diterapkan di sekolah melalui penanaman disiplin. Peraturan-peraturan sekolah yang berbeda dengan peraturan di rumah akan mengikat semua peserta didik untuk mematuinya. Peserta didik akan menyadari bahwa ada prinsip peraturan-peraturan yang wajib mereka patuhi. Proses mematuhi peraturan akan mendorong peserta didik mempunyai disiplin diri. Di sekolah peserta didik juga ‘diperkenalkan’ dengan ikatan kelompok, mengkaji struktur dan pola hidup bermasyarakat, sehingga mereka mengetahui dan menerima nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Dengan ini peserta didik akan dapat diorientasikan ke dalam masyarakat¹².

Lebih jauh, Durkheim mengemukakan bahwa fungsi sekolah

untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat dilaksanakan melalui proses sosialisasi. Individu yang tidak dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat akan mengalami *anomie*. Dalam masyarakat modern, pengaruh tradisi dan agama yang semakin longgar menyebabkan terdapat individu yang hilang pegangan hidup. Kehilangan pegangan hidup merupakan salah satu penyebab hilangnya arah kehidupan yang menyebabkan terjadinya *anomie*. Menurut Durkheim, individu yang mengalami *anomie* bisa ‘diselamatkan’ melalui pendidikan moral.

III. PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH DASAR INDONESIA

A. *Dasar dan Latar Pendidikan Moral di Indonesia*

Pendidikan moral bagi bangsa Indonesia sudah dikenal sejak lama, bahkan sebelum bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Pendidikan moral pada waktu itu terdapat dalam religi, adat istiadat, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Pendidikan moral pada masa itu diintegrasikan pada :

- 1) nyanyian-nyanyian daerah
- 2) cerita-cerita legenda, misalnya legenda Si Malin Kundang, yang berisikan pendidikan moral
- 3) cerita binatang, misalnya cerita si kancil, cerita persahabatan antara

¹¹ Ginting, Lukas. 1990. *Op cit*, hal: xiv.

¹² Dawi, Amir Hasan. 2006. *Pentorian Sosiologi dan Pendidikan*. Perak-Malaysia: Quantum Books. hal: 75.

angsa dan kura-kura, dan sebagainya yang berisikan pendidikan moral

- 4) pesantren, dimana pendidikan moral diintegrasikan dengan pendidikan agama Islam

Dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia, melalui pepatah-petitih, nyanyian dan cerita-cerita telah diperkenalkan kesadaran keagamaan, kekeluargaan, kesadaran untuk bermasyarakat, bermasyarakat, bekerja secara gotong royong, dan kesadaran untuk tenggang rasa. Dengan demikian, pendidikan moral telah tumbuh dalam masyarakat Indonesia sejak berabad-abad yang lalu.

Bagi masyarakat Indonesia, pendidikan moral berdasar kepada Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara menjadi dasar penentu pendidikan moral. Sebagai moral negara, maka moral Pancasila itu harus dimiliki atau menjadi moral perseorangan, sehingga manusia Indonesia mempunyai sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk kepentingan tersebut, haruslah ada proses internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, salah satunya dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, yang diajarkan melalui kemasan kurikuler berbentuk mata pelajaran atau mata kuliah PKn.

PKn pada hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila. Secara *konseptual-epistemologis*, pendidikan Pancasila dapat dilihat sebagai suatu *integrated knowledge system*¹³ yang memiliki misi menumbuhkan potensi peserta didik agar memiliki '*civic intelligence*' dan '*civic participation*' serta '*civic responsibility*' sebagai warga negara Indonesia dalam konteks watak dan peradaban bangsa Indonesia yang ber-Pancasila¹⁴.

Kemasan kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan secara historis-kurikuler telah mengalami pasang surut¹⁵. Dalam kurikulum sekolah sudah dikenal, mulai dari *Civics* tahun 1962, *Pendidikan Kewargaan Negara dan Kewargaan Negara* tahun 1968, *Pendidikan Moral Pancasila* tahun

¹³ Hartonian, H..M. 1992. "The Social Studies and Project 2061: An Opportunities for Harmony" dalam *The Social Studies*. 83: 4:160-163; Winataputra, U. S. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi.*, (Disertasi) Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

¹⁴ Winataputra, U. S. 2006. *Konsep dan Strategi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah: Tinjauan Psiko-Pedagogis*, Jakarta: Panitia Semiloka Pembudayaan Nilai Pancasila.Dit.Dikdas, Ditjen Mendikdasmen (Makalah).

¹⁵ Winataputra, U. S. 2001. *Op cit*.

1975, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* tahun 1994, dan *Pendidikan Kewarganegaraan* tahun 2003. Sementara itu di perguruan tinggi sudah dikenal *Pancasila dan Kewiraan Nasional* tahun 1960-an, *Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan* tahun 1985, dan PKn tahun 2003.

Di negara lain kemasam kurikulum serupa itu dikenal sebagai *civic education* dalam konteks wacana pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis menurut konstitusi negaranya masing-masing. Sebagaimana berkembang di berbagai belahan dunia, tercatat adanya berbagai *nomenklatur* untuk itu, yakni: *Citizenship Education* (Inggris), termasuk di dalamnya *civic education* (Amerika Serikat) atau disebut juga *pendidikan kewarganegaraan* (Indonesia), atau *ta'limatul muwwatanah/at tarbiyatul al wathoniyah* (Timur Tengah) atau *educacion civicas* (Mexico), atau *Sachunterricht* (Jerman) atau *civics* (Australia) atau *social studies* (Selandia Baru) atau *Life Orientation* (Afrika Selatan) atau *People and society* (Hungaria), atau *Civics and moral education* (Singapura)¹⁶ (Kerr,

1999; Winataputra, 2001). Semua itu merupakan wahana pendidikan karakter (*character education*) yang bersifat *multidimensional*¹⁷ yang dimiliki oleh kebanyakan negara di dunia.

Untuk Indonesia pada saat ini, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni pada pasal 37 menggariskan program kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi. Aspek-aspek yang menjadi lingkup mata pelajaran ini, mencakup persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, hak azasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan globalisasi. Walaupun dalam enumerasinya Pancasila ditempatkan sejajar dengan aspek lain, namun dalam pengorganisasian isi dan pengalaman belajar ia ditempatkan sebagai *core* atau *concerto* dalam *orkestrasi* kesemua aspek untuk mencapai tujuan akhir dari pendidikan Pancasila secara generik. Dengan demikian untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat dikembangkan pendidikan kewarganegaraan yang

¹⁶Kerr, D. 1999. *Citizenship Education: An international Comparison*. London: National Foundation for Educational Research and Qualifications and Curriculum Authority; Winataputra, U. S. 2001, *Op cit*.

¹⁷Cogan J.J. and Derricott, B.J. 1998. *Multidimensional Civic Education*. Tokyo: Kogan Page.

koheren dengan pendidikan nilai-nilai Pancasila.

Sebagai *benchmark*, konsep *civic education* secara generic akademik, kini menjadi konsep yang lebih multifaset. Adalah CIVITAS International (2006)¹⁸ yang merumuskan konsep tersebut secara lebih luas seperti berikut.

“Civic education involves many things: the study of constitutions; the rule of law and the operations of public institutions; the study of electoral processes; instruction in the values and attitudes of good citizenship; the development of the skills of government and politics; issues of human rights and intergroup relations; and conflict resolution. Civic education is pedagogy, encompassing education and training of both youths and adults in and outside of schools. Civic education can also take place through radio and television broadcasting and other means. Distance learning techniques are increasingly important, parti-

cularly in the developing world”.

Sementara itu, dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 secara normatif dikemukakan bahwa ‘mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945’. Sedangkan tujuannya, digaris-kan dengan tegas, adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan

¹⁸CIVITAS International. 2006. *Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education

teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 maka ruang lingkup mata pelajaran PKn untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan
- 2) Norma, hukum, dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan ber-negara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional
- 3) Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM
- 4) Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara
- 5) Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi
- 6) Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi
- 7) Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka
- 8) Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

Proses pendidikan yang dituntut dan menjadi kepedulian PKn adalah proses pendidikan yang terpadu utuh, yang juga disebut sebagai bentuk *confluent education*¹⁹. Tuntutan pedagogis ini memerlukan persiapan mental, profesionalitas, dan hubungan sosial guru-peserta didik yang *kohesif*. Guru seyogyanya *siap memberi contoh dan menjadi contoh*, sebagaimana postulat bahwa *Value is neither taught nor caught, it is learned*²⁰. Nilai tidak bisa diajarkan atau pun ditangkap sendiri tetapi dicerna melalui proses belajar. Oleh karena itu nilai harus termuat dalam materi pelajaran PKn.

PKn merupakan mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat *multidimensional*. Ia merupakan pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik. Namun yang paling menonjol adalah sebagai pendidikan nilai dan pendidikan moral. Oleh karena itu secara singkat PKn dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi *pendidikan nilai* dan *moral*. Alasannya antara lain sebagai berikut.

- 1) Materi PKn adalah *konsep-konsep nilai Pancasila dan UUD*

1945 beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia.

- 2) *Sasaran belajar akhir* PKn adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam *perilaku nyata* kehidupan sehari-hari.
- 3) Proses pembelajarannya menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial dari peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu *bukan hanya dipahami* (bersifat kognitif) tetapi *dihayati* (bersifat afektif) dan *dilaksanakan* (bersifat perilaku).

Pendidikan nilai dan moral sebagaimana dicakup dalam PKn tersebut, dalam pandangan Lickona²¹ disebut *educating for character* atau 'pendidikan watak'. Lickona mengartikan watak atau karakter sesuai dengan pandangan filosof Michael Novak (Lickona, 1992:50-51), yakni *Compatible mix of all those virtues identified by religions traditions, literary stories, the sages, and persons of common sense down through history*. Artinya suatu perpaduan yang harmonis dari berbagai *kebajikan* yang tertuang dalam *keagamaan*, sastra, pandangan kaum cerdik-pandai dan manusia pada umumnya sepanjang zaman. Oleh

¹⁹Mc Neil, J.D. 1981. *Curriculum: A Comprehensive Introduction*. Boston: Little Brown and Co.

²⁰Mc Neil, J.D. 1981. *Op cit*.

²¹ Lickona, T. 1992. *Educating for Character*. New York: Bantam Books.

karena itu Lickona²² memandang karakter atau watak itu memiliki tiga unsur yang saling berkaitan yakni *moral knowing, moral feeling, and moral behavior* atau konsep moral, rasa dan sikap moral dan perilaku moral.

Apabila buah pemikiran Lickona tersebut dikaitkan dengan karakteristik PKn di sekolah dasar, maka model Lickona itu dapat digunakan sebagai kerangka pikir dalam melihat sasaran belajar dan isi PKn. Setiap nilai Pancasila yang telah dirumuskan sebagai butir materi PKn pada dasarnya harus memiliki aspek *konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral*. Contohnya, untuk menanamkan nilai kejujuran dalam pembelajaran PKn harus menyentuh ketiga aspek seperti berikut:

Konsep Moral

- 1) Kesadaran perlunya kejujuran
- 2) Pemahaman tentang kejujuran
- 3) Manfaat kejujuran di masa depan
- 4) Alasan perlunya kejujuran
- 5) Bagaimana cara menerapkan kejujuran
- 6) Penilaian diri sendiri mengenai kejujuran

Sikap Moral

- 1) Kata hati kita tentang kejujuran
- 2) Rasa percaya diri kita untuk senantiasa berlaku jujur pada orang lain

- 3) Empati kita terhadap orang yang jujur
- 4) Cinta kita terhadap kejujuran
- 5) Pengendalian diri kita untuk selalu berlaku jujur
- 6) Rasa hormat kita kepada orang lain yang berlaku jujur

Perilaku Moral

- 1) Kemampuan bersikap dan berlaku jujur
- 2) Kemauan untuk senantiasa berusaha jujur
- 3) Kebiasaan untuk selalu bersikap dan berbuat jujur

Dari pembahasan mengenai PKn sebagai pendidikan nilai dan moral kiranya dapat dicatat hal-hal sebagai berikut:

- 1) PKn sebagai mata pelajaran yang memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan watak atau karakter peserta didik sesuai dengan dan merujuk kepada nilai-nilai dan moral Pancasila.
- 2) Nilai dan moral Pancasila dan UUD 1945 dapat dikembangkan dalam diri peserta didik melalui pengembangan konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral setiap rumusan butir nilai yang telah dipilih sebagai materi PKn.

²² *Ibid*, hal: 51.

B. Esensi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar sebagai Pendidikan Moral

Di dalam kurikulum pendidikan dasar telah digariskan bahwa di tingkat sekolah dasar materi pelajaran PKn ditekankan pada pengamalan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjang oleh pengetahuan dan pengertian sederhana sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan berikutnya²³. Adapun tujuan dan ruang lingkup PKn di sekolah dasar secara kelas demi kelas sebagaimana tertuang dalam Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Sekolah Dasar, adalah sebagai berikut :

1) Kelas I

Tujuan PKn di kelas I adalah siswa dapat mengemukakan berbagai contoh perbuatan dalam kehidupan yang sesuai dengan moral lingkungannya (keluarga, adat, budaya). Untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan pokok-pokok bahasan sebagai berikut : keterampilan, kasih sayang, kebangsaan, ketertiban, tolong menolong, kerukunan, keberanian, kebersihan/kesehatan, hidup hemat, keadilan, ketaatan, belas

kasih, kesetiaan, kepatuhan, dan hormat menghormati.

2) Kelas II

Tujuan PKn di kelas II adalah siswa mampu mengikuti/mencontoh berbagai perbuatan yang ada dalam kehidupan di lingkungannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan pokok-pokok bahasan sebagai berikut: keyakinan, kasih sayang, berterus terang, kepuasan hati, ketertiban, persamaan derajat, keimanan, kesederhanaan, rela berkorban, kedisiplinan, kekeluargaan, menghargai, kemurahan hati, kerukunan, dan kepatuhan.

3) Kelas III

Tujuan PKn di kelas III adalah siswa dapat melakukan berbagai hal yang dituntut oleh keputusan nilai moral umum dan baku serta mengemukakan perilaku keteladanan yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan pokok-pokok bahasan sebagai berikut : keserasian, tenggang rasa, percaya diri, kebebasan, kedisiplinan, saling menghormati, kemanusiaan, kepentingan umum, tanggung jawab, keindahan, kejujuran, dan ketekunan.

4) Kelas IV

Tujuan PKn di kelas IV adalah siswa dapat menjelaskan dan mencoba berperilaku yang sesuai

²³Wahab , H.A. Aziz dan Udin S. Winatapura. 2006. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka. hal: 6.

dengan tuntutan lingkungan sekitarnya (lingkungan sekitar kecamatan dan kabupaten/kota). Untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan pokok-pokok bahasan sebagai berikut : persamaan hak, keingintahuan, kesiapsiagaan, tata karma, tenggang rasa, ketulusan, kerajinan, dan hormat menghormati.

5) Kelas V

Tujuan PKn di kelas V adalah siswa dapat berupaya menyesuaikan perilaku kehidupannya ke arah tuntutan keharusan nilai moral bangsa dan negara (lingkungan sekitar provinsi dan nasional). Untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan pokok-pokok bahasan sebagai berikut : ketaatan, persamaan hak dan kewajiban, keteguhan hati, kebebasan, percaya diri, ketahanan, ketertiban, kebersihan, ketulusan, kepahlawanan, dan pengendalian diri.

6) Kelas VI

Tujuan PKn di kelas VI adalah siswa meyakini dan dapat berperilaku sebagaimana tuntutan keharusan pemerintah negara Republik Indonesia (wilayah nasional). Untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan pokok-pokok bahasan sebagai berikut: keindahan, lapang dada, persatuan dan kesatuan, kebijaksanaan, keserasian, berjiwa besar, pengab-

dian, kepedulian, cinta tanah air, tanggung jawab, dan harga menghargai²⁴.

Semua tujuan pada setiap kelas menuntut perilaku nyata (*overt behavior*). Hal ini berarti bahwa konsep moral yang diajarkan tidak boleh berhenti pada pikiran semata, tetapi harus terwujudkan dalam perbuatannya. Tuntutan pedagogis ini memerlukan persiapan mental, profesionalisme dan hubungan sosial guru-peserta didik yang kohesif. Guru seyogyanya siap memberi contoh dan menjadi contoh.

IV. PENUTUP

Dari uraian terdahulu diketahui bahwa Durkheim memandang pendidikan moral sangat tepat diberikan pada masa atau ‘tahap kanak-kanak kedua’, yaitu pada anak-anak berusia sekolah dasar. Menurut Durkheim, sekolah (khususnya sekolah dasar) merupakan lembaga yang sangat penting bagi pembentukan dan perkembangan moral anak.

Di Indonesia, pendidikan moral sudah ada sejak lama. Pendidikan moral dimasukkan dalam kemasan kurikuler melalui mata pelajaran PKn yang diajarkan sejak dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Satu hal yang membedakan pendidikan moral yang

²⁴ *Ibid*, hal: 108-112

dikemukakan Durkheim dengan pendidikan moral di Indonesia adalah, Durkheim tidak memasukkan agama sebagai salah satu faktor pembentuk atau sumber moralitas dan pendidikan

moral. Padahal di Indonesia moralitas dan pendidikan moral itu salah satu sumbernya adalah ajaran agama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulah, Taufik dan A.C. van Der Leeden (Penyunting). 1986. *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- CIVITAS International. 2006. *Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education
- Cogan J.J. and Derricott , B.J. 1998. *Miltidimensional Civic Education*. Tokyo: Kogan Page.
- Dawi, Amir Hasan. 2006. *Penteorian Sosiologi dan Pendidikan*. Perak-Malaysia: Quantum Books.
- Depdiknas RI. 2003. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 tahun 2006 tentang Standar Isi*. Jakarta: Depdiknas.
- Ginting, Lukas. (Alih bahasa). 1990. *Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*. Jakarta: Erlangga.
- Hartonian,H..M. 1992. "The Social Studies and Project 2061: An Opportunities for Harmony" dalam *The Social Studies*. 83;4:160-163.
- Johnson, D.P. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I* (Diindonesiakan oleh Robert M. Z. Lawang). Jakarta : PT Gramedia.
- Kerr, D. 1999. *Citizenship Education: An international Comparison*. London: National Foundation for Educational Research and Qualifications and Curriculum Authority.
- Lickona, T. 1992. *Educating for Character*. New York: Bantam Books.
- Mc Neil, J.D. 1981. *Curriculum: A Comprehensive Introduction*. Boston: Little Brown and Co.
- Veeger, K. J. 1990. *Realitas Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, H.A. Aziz dan Udin S. Winataputra. 2006. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wilson, E.K. 1990. Kata Pengantar dari Editor untuk Edisi Bahasa Inggris (Alih bahasa: Lukas Ginting) dalam *Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*. Jakarta: Erlangga.

- Winataputra, U. S. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi.*, (Disertasi) Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- _____. 2006. *Konsep dan Strategi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah: Tinjauan Psiko-Pedagogis*, Jakarta: Panitia Semiloka Pembudayaan Nilai Pancasila. Dit. Dikdas, Ditjen Mandikdasmen (Makalah).